



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

POLICY IMPLEMENTATION OF SELF-SUPPORTING HOUSING STIMULAN ASSISTANCE PROGRAM

Zulfachry¹, Zul Fadli², Zul Rachmat³, ZH Nurul Kusumawardhani⁴, Nurhidayah⁵

¹Universitas Puangrimanggalatung

¹zulfachri25@gmail.com

²Universitas Pattimura

²dhidottt@gmail.com

^{3,4,5}STMIK Amika Soppeng

³zulrachmat@amiklps.ac.id

⁴zh.nurulkusumawardhany@yahoo.com

⁵nurhidayahjafarzm@gmail.com

Abstrak (11pt, bold)

Riset ini bertujuan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan mengidentifikasi faktor penentu dari implementasi kebijakan tersebut pada Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Riset ini menggunakan metode pendekatan yang fokus pada pengamatan yang lebih mendalam (kualitatif) dengan berdasar pada yang diberikan oleh responden secara lisan (wawancara), pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian (observasi), serta mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan riset ini (telaah dokumen). Hasil riset menunjukkan bahwa secara lugas pemerintah berpihak kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang yang telah ditetapkan, hanya saja ada beberapa masalah yang terletak pada pelaksanaan kebijakannya. Kemudian, dalam pemenuhan aspek kebijakan, bantuan sumberdaya dan instansi yang berhubungan langsung telah membuktikan bahwa pemerintah berpihak pada masyarakat akan kebutuhan hunian yang layak, sehingga situasi tersebut berjalan sebagaimana mana mestinya. Program BSPS ini dapat terlaksana dengan cepat dan tepat karena adanya dukungan dari segi kondisi ekonomi masyarakat, keterikatan dan kecakapan dalam bergotong-royong

Kata Kunci : implementasi kebijakan, program BSPS

Abstract

This research aims to explain the implementation of government policies in the self-help housing stimulant assistance program (BSPS) and identify the determinants of the implementation of these policies in the Lalabata Rilau Village, Lalabata District, and Soppeng Regency. This research uses an approach that focuses on more in-depth observations (qualitative) based on what is provided orally by respondents (interviews), direct observation of the research location (observation), as well as studying the literature related to this research (review; document). The results of the research show that the government is straightforwardly on the side of the community in accordance with the mandate of the law that has been stipulated; it's just that there are a number of problems that lie in the implementation



of its policies. Then, in fulfilling the policy aspect, the assistance of resources and agencies that are directly related has proven that the government is on the side of the community regarding the need for adequate housing, so that the situation runs as it should. This BSPS program can be carried out quickly and precisely because of the economic conditions of the community, commitment, and skills in working together.

Keywords : *implementation of policies, self-help housing stimulant assistance programs.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah bertanggungjawab dalam memfasilitasi masyarakat agar kebutuhan hunian yang layak dapat terpenuhi dalam rangka memanifestasikan pemukiman yang memadai untuk semua orang. Sehingga pemerintah seharusnya membuat program-program pembangunan pemukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Ada banyak program yang dibuat oleh pemerintah mengenai pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya, dimana ini adalah program dalam rangka peningkatan jumlah MBR dalam membangun pemukiman yang berkualitas.

Upaya pelaksanaan Program BSPS telah jelas aturannya, namun demikian komitmen aparat melayani dan partisipasi masyarakat masih terlihat lemah. Hal ini terlihat dan disebabkan karena lingkungan kebijakan ini di implementasikan dengan kondisi social yang berbeda, dukungan public dan actor pelaksana kebijakan bersinergi sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan. Satu hal yang dapat penulis melihat adanya factor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan bahwa kelayakan didasarkan pada data penerima bantuan dan memerlukan kerjasama stakeholders setrta swadaya masyarakat dalam bentuk partisipasi, ini memerlukan perhatian dan didukung serta hamata yang dapat dicari solusinya sehingga kebijakan ini dapat terselenggara dengan baik.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada riset ini adalah bagaimana implementasi serta faktor determinan kebijakan dalam pelaksanaan program BSPS pada di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat riset ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi dan faktor determinan pada kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program BSPS di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

METODE

Lokasi Penelitian

Riset ini berlokasi di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Metode Penelitian

Riset ini memakai metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana riset ini menggambarkan tentang onjek riset secara deskriptif.

Sumber Data/Informan

Adapun sumber data pada riset ini adalah beberapa informan yang diantaranya adalah 1 orang Kepala Dinas PUPR Kabupate Soppeng, 1 orang pendamping lapangan, 2 orang tokoh masyarakat dan 3 orang pegawai Kantor Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sehingga total informan adalah 7 orang.



Fokus Penelitian

Pada riset ini, peneliti memfokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja aparat dalam mengimplementasikan kebijakan menurut teori Mazmanian & Sebatier dimana menurut ahli tersebut terdapat tiga kategori atas variabel yang mempengaruhi percepatan tercapainya tujuan formal dan semua proses implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan karakteristik lingkungan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam riset ini, dimana peneliti melakukan wawancara terhadap informan untuk menggali lebih dalam informasi yang berhubungan dengan riset ini. Kemudian sebelumnya peneliti juga melakukan observasi terlebih dahulu, serta tentunya aspek pendukung dari telaah dokumen yang berkaitan dengan riset ini.

Teknik Keabsahan Data

Dalam menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan metode pengamatan, triangulasi, *focus discussion group (FGD)*, uji transferabilitas, uji realibilitas, dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan peneliti serta pernyataan wawancara yang tidak berstruktur terhadap pegawai dan masyarakat di wilayah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai informan pendukung penulis, bahwa sebahagian besar menyatakan program BPS sebagai sebuah kebijakan yang mampu memahami karakteristik masalah atas kelompok sasaran menunjukkan bahwa hal ini bermula pada teknis permasalahan yang dihadapi masyarakat serta membutuhkan pendataan yang akurat. Hal ini yang telah diusulkan lewat pemerintah daerah melalui PUPR sesuai persyaratan yang dipersyaratkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., serta sebahagian kecil menyatakan bahwa permasalahan teknis sedikit terlalu menyulitkan masyarakat karena keterpenuhan syarat yang begitu ketat, namun demikian dengan keterbatasan jumlah dan permasalahan teknis tersebut dapat diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder dengan baik. Dari sisi ini keseluruhan permasalahan dan perilaku sasaran program dapat dinyatakan berjalan dengan baik, namun demikian sedikit mengalami masalah akan tetapi tidak berarti dan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pelibatan masyarakat lewat kelompok kerja oleh masyarakat itu sendiri dan telah berjalan dengan baik.

Dalam perspektif karakteristik kebijakan, sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa dari sisi isi kebijakan dapat dipahami oleh seluruh aparat pemerintah dan masyarakat khususnya penerima program BPS ini. Konteks isi kebijakan juga tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya dan instansi selaku stakeholders, dukungan ini diperkuat oleh ketersediaan dana dan material yang mudah dijangkau dengan ketersediaan pula regulasi baik teknis maupun operasionalnya. Dari beberapa hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa isi dan dukungan sumberdaya dikarenakan memiliki kejelasan aturan yang dipedomani oleh seluruh aparat yang terlibat termasuk masyarakat dengan satu komitmen yang dijalankan aparat dengan baik. Komitmen itu di wujudkan dengan adanya akses informasi yang diwujudkan dengan partisipasi langsung oleh masyarakat selaku penerima BPS. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik kebijakan ini telah terselenggara dengan baik.

Sementara aspek lingkungan kebijakan, menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan kebijakan sebagai bagian yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan diluar peraturan dan perundang-undangan yang ada, menjadi factor yang dapat pula menentukan keberhasilan kebijakan. Lingkungan kebijakan dalam aplikasinya tetap memperhatikan kondisi social ekonomi masyarakat dimana pemerintah mampu menciptakan ruang dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang homogeny, pelibatan masyarakat yang sudah mengakar dengan adat istiadat kebiasaan yang saling bekerjasama sehingga setiap program BPS diwilayah Kelurahan ini mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta



didukung pula oleh komitmen dan keterampilan aparat memanfaatkan kondisi tersebut melalui pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Program bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai sebuah kebijakan yang mampu memahami karakteristik masalah atas kelompok sasaran menunjukkan bahwa hal ini bermula pada teknis permasalahan yang dihadapi masyarakat serta membutuhkan pendataan yang akurat. Hal ini yang telah diusulkan lewat pemerintah daerah melalui PUPR sesuai persyaratan yang dipersyaratkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebahagian kecil menyatakan bahwa permasalahan teknis sedikit terlalu menyulitkan masyarakat karena keterpenuhan syarat yang begitu ketat, namun demikian dengan keterbatasan jumlah dan permasalahan teknis tersebut dapat diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder dengan baik.

Dalam konteks karakteristik kebijakan sebagaimana yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa dari sisi isi kebijakan dapat dipahami oleh seluruh aparat pemernitah dan masyarakat khususnya penerima program BSPS ini. Konteks isi kebijakan juga tidak terlepas adanya dukungan sumber daya dan instansi selaku stakeholders, dukungan ini diperkuat oleh ketersediaan dana dan material yang mudah dijangkau dengan ketersediaan pula regulasi baik teksnis maupun operasionalnya.

Berkaitan dengan Lingkungan Kebijakan, penulis dapat uraikan sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya telah terlaksana dengan adanya dukungan kondisi social ekonomi masyarakat, dimana kondisi telah memanfaatkan teknologi dalam merealisasikan program sampai kepada pengerjaan teknis BSPS. Kondisi masyarakat yang homogen telah memudahkan karena didasari oleh kultur budaya, adat kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun temurun membuat gotongroyong telah berjalan, hal ini disebabkan karena sifatnya swadaya dan dikerjakan langsung oleh kelompok masyarakat. Kondisi masyarakat sebahagian telah meningkat kualitas ekonomi dan hidupnya sehingga pelibatan masyarakat turut serta membantu dan hal inilah yang diharapkan pemerintah dalam bentuk partisipasi.

Dalam konteks lingkungan kebijakan ini sebagaimana yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan kebijakan sebagai bagian yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan diluar peraturan dan perundang-undangan yang ada, menjadi factor yang dapat pula menentukan keberhasilan kebijakan. Lingkungan kebijakan dalam aplikasinya tetap memperhatikan kondisi social ekonomi masyarakat dimana pemerintah mampu menciptakan ruang dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang homogeny, pelibatan masyarakat yang sudah mengakar dengan adat istiadat kebiasaan yang saling bekerjasama sehingga setiap program BSPS diwilayah Kelurahan ini mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Demikian pula kaitan dengan faktor pendukung serta hambatan dan upaya pemecahannya, dalam perspektif hambatan aspek sumber daya baik manusia maupun sarana pendukung selalu saja menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan program BSPS, hal ini disebabkan keterbatasan pemerintah, termasuk aspek keterpenuhan syarat calon penerima, kondisi lingkungan, social ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya yang dapat mendukung pembangunan wilayah kelurahan secara umum, hal ini belum maksimal partisipasi itu dapat diwujudkan dengan maksimal. Hal tersebut bahwa pada prinsipnya program ini telah diberdayakan akan tetapi pelibatan masyarakat ada dalam kelompok lingkungannya, termasuk masalah calon penerima dengan syarat yang menyulitkan masyarakat banyak diantara mereka tidak dapat memenuhi sehingga masih ditemukan hunian rumah ini belum layak di huni di Kelurahan tersebut.

Upaya aparat pemerintah dalam mengantisipasi sebuah permasalahan yang dihadapi dilapangan berkenaan dengan kebijakannya mengajak masyarakat secara bersama-sama pemerintah Kelurahan untuk mengantisipasi dan mengurus syarat administrasi kelengkapan berkasnya untuk dapat diusulkan calon penerima program BSPS tahun yang akan datang, kemudian terus mensosialisasikan pembangunan dari seluruh aspek dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memanfaatkan dan mengajak seluruh stakeholder untuk terlibat agar pembangunan di Kelurahan ini dapat direalisasikan



agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkatkan ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan pada riset ini adalah telah diterapkannya kebijakan pemerintah berupa program BSPS, namun dalam proses pelaksanaannya cukup bermasalah. Sedangkan dalam aspek kebijakan, *support* sumberdaya dan instansi yang berhubungan langsung menunjukkan *result* bahwa pemerintah berpihak terhadap kebutuhan masyarakat berupa pemukiman yang memadai dan layak untuk ditinggali. Program BSPS ini pun dapat terlaksana dengan cepat dan tepat karena adanya dukungan dari segi kondisi ekonomi masyarakat, keterikatan dan kecakapan dalam bergotong-royong dalam membangun kebersamaan. Kemudian mengenai faktor determinan terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi keberhasilan program BSPS dirasa dapat diatas dengan baik. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemerintah kelurahan, *stakeholders* dunia bisnis dan masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu program BSPS.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari peneliti atas riset ini adalah peran pemerintah kelurahan, *stakeholder* serta masyarakat mesti dipertahankan dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah khususnya dalam program BSPS, karena dengan adanya hal tersebut maka program BSPS bisa tepat sasaran dan terlaksanakan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto.2008 “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*” Gajah Mada University Press. Jogjakarta
- A.G.Subarsono, 2005 “Analisis Kebijakan Publik” (Konsep, Teori dan Aplikasinya) Pusta Belajar Yogyakarta
- Agustino Leo, 2020 “Dasar-dasar kebijakan Publik” Edisi Revisi Alfabeta Bandung
- Brata, Atep, Adya. ,*Dasar-Dasar pelayanan Prima*. 2004 (Cetakan kedua) Gramedia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989 ”*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Balai Pustaka
- Dwijowijoto, N. 2006 “*Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*” Jakarta : Elex media Komputindo.
- Edwards III, George C. (1980), “*Implemetation Public Policy*”, Congressional Quarterly Press, Washinton.
- Fredericson, 2007. “*Public Policy Bureacarcy A Introduction*” Englewood, Cliffs, NJ : Prentice Hall Inc.
- Hasibuan,S.P 2001.*Manajemen Sumber daya Manusia.(edisi revisi)*..Jakarta Bumi Aksara.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- Harbani Pasolong, 2010 “*Teori Administrasi Publik*” Alfabeta Bandung.
- Miles, Matthew B, dan Huberman, A. Michel. 1992. “*Analisa Data Kualitatif* (Terjemahan Tjetjep Rohidi). Jakarta : UI Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman (lembaran negara nomor 101)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Permen PUPR nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan tatalaksana Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466).
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*” Bandung . Alfa Beta.
- Surat Edaran Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Thoha Miftah 2008. “ *Administrasi Publik Kontemporer*” Kencana Prenada Group Jakarta



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011., tentang perumahan dan kawasan pemukiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7 tambahan lembar negara nomor 5188.
Wiiliam N.Dunn, 2003. “ *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*” edisi kedua Gajah Mada University Press
Yogi Suprayogi Sugandi, 2011 “ *Administrasi Publik* “ Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu Yogyakarta.
Zulkarnaen, 2016 “Implementasi Kebijakan Bantuan Sirtimulus perumahan *swadaya* di Kecamatan Parigi”; Jurnal Nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Copyright (c) 2023 Zul Fachry, Zul Fadli, Zul Rachmat, ZH Nurul Kusumawardhani, Nurhidayah